



Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis: Studi pada Model Komunikasi dan Disposisi Birokrasi di Tingkat Daerah

INFO PENULIS

Yuyun Fitriani
Universitas Dharma Wacana
yuyunfitriani01.yf@gmail.com

Ade Maulidya
Universitas Sriwijaya
Ade.maulidya@fisip.unsri.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 6, No. 1, April 2026
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Fitriani, Y., & Maulidya, A. (2026). Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis: Studi pada Model Komunikasi dan Disposisi Birokrasi di Tingkat Daerah. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 1669-1682.

Abstrak

Program MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan status gizi peserta didik, menurunkan angka stunting, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan terhadap berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi program, seperti pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, dinas pendidikan, dinas kesehatan, sekolah, penyedia makanan, serta penerima manfaat. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antaraktor telah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi kendala berupa perubahan kebijakan yang cepat, ketidaksamaan penerimaan informasi, keterlambatan penyampaian jadwal distribusi, dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Dari aspek sumber daya, dukungan anggaran dan personel relatif memadai, tetapi masih terdapat kesenjangan kompetensi sumber daya manusia serta variasi kapasitas pelaksanaan antarwilayah. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mendukung keberhasilan program, sedangkan struktur birokrasi telah didukung oleh standar operasional prosedur (SOP), namun fragmentasi organisasi dan koordinasi antarlembaga masih menjadi tantangan implementasi. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya dukungan anggaran, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana, serta birokrasi yang terintegrasi. Penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penyempurnaan tata kelola implementasi menjadi rekomendasi utama untuk meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis di tingkat daerah.

Kata kunci: implementasi kebijakan, Program Makan Bergizi Gratis, George C. Edward III, komunikasi, birokrasi.

Abstract

The MBG Program is a strategic national policy designed to improve students' nutritional status, reduce stunting, and strengthen Indonesia's human resource development. This study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, documentation, and literature reviews involving local governments, the National Nutrition Agency, education and health offices, schools, food providers, and program beneficiaries. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, including data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that communication among implementing agencies has generally been effective; however, several challenges remain, including frequent policy changes, unequal dissemination of information, delays in communicating food distribution schedules, and limited inter-agency coordination. In terms of resources, financial support and personnel are generally adequate, although disparities in human resource competencies and implementation capacity across regions persist. The disposition of implementers reflects a strong commitment to achieving program objectives, while the bureaucratic structure has been supported by Standard Operating Procedures (SOPs). Nevertheless, organizational fragmentation and weak inter-institutional coordination continue to hinder effective implementation. The study concludes that the success of the MBG Program depends not only on sufficient financial resources but also on effective communication, adequate resources, implementers' commitment, and an integrated bureaucratic system. Strengthening cross-sector coordination, improving human resource capacity, and enhancing governance mechanisms are recommended to optimize the implementation of the Free Nutritious Meal Program at the local level.

Keywords: policy implementation, Free Nutritious Meal Program, George C. Edward III, communication, bureaucracy.

A. Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang dirancang untuk menjawab persoalan multidimensional terkait gizi, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya pada kelompok anak usia sekolah (Rambe et al., 2025). Kebijakan MBG dilandasi oleh kondisi anak-anak di Indonesia yang masih dihadapkan pada permasalahan malnutrisi dan *stunting*, khususnya pada kelompok masyarakat menengah dan bawah. Implikasi dari permasalahan malnutrisi dan *stunting* tidak hanya kepada kualitas kesehatan anak-anak yang memiliki kecenderungan adanya hambatan perkembangan tubuh dan kognitif yang akan mempengaruhi aktivitas keseharian anak-anak, tetapi juga akan terakumulasi menjadi permasalahan bangsa yang mana kualitas sumber daya manusia Indonesia akan sulit berkembang dan bersaing dengan bangsa lainnya.

Pemenuhan gizi melalui asupan makanan yang cukup secara kualitas yang memadai berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas (Ayuni, 2025). Salah satu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi yaitu kebutuhan pemenuhan gizi melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi. Pemenuhan gizi sejak dini adalah modal utama pertumbuhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan menentukan produktivitas dan kemajuan ekonomi. Pembangunan manusia tidak hanya soal penambahan kemampuan teknis dan pengetahuan, tetapi juga harus memastikan kondisi fisik yang optimal sebagai prasyarat keberhasilan pembelajaran dan pencapaian potensi individu. Pendekatan multisektor dalam penanganan *stunting* harus dilakukan secara holistik, mengintegrasikan intervensi kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi serta kebijakan publik secara simultan (Ahsan; Ahmad Nur, 2025). Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Program Makan Bergizi Gratis di sekolah menjadi dasar hukum pelaksanaan program ini, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan aspek kesehatan ke dalam penyelenggaraan pendidikan dasar (PP Nomor 83 Tahun 2024). (Maulidya, 2025).

Kebijakan ini didasarkan pada asumsi bahwa intervensi gizi yang sistematis pada lingkungan sekolah dapat menjadi salah satu alat paling efektif untuk menurunkan angka malnutrisi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Secara global, program serupa telah diterapkan di berbagai negara berkembang dan menunjukkan hasil yang signifikan. Misalnya, Mid-Day Meal Scheme di India dan School Feeding Program di Ghana terbukti meningkatkan kehadiran, partisipasi, dan performa akademik siswa. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Januari 2025. Program ini

bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil, dengan target mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2029 (Lendra, 2025).

Implementasi suatu kebijakan seringkali mengalami distorsi yang bisa mengakibatkan kegagalan suatu kebijakan (Febrian, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak positif terhadap kesehatan siswa dalam jangka panjang (Qomarrullah, 2025). Strategi penguatan yang direkomendasikan meliputi diversifikasi menu makanan bergizi, pemanfaatan bahan pangan lokal, monitoring kesehatan siswa secara berkala, dan integrasi dengan pendidikan karakter. Dengan demikian, MBG tidak hanya berfungsi sebagai intervensi kesehatan, melainkan juga menjadi instrumen pendidikan penting dalam upaya membangun sumber daya manusia yang unggul di Provinsi Lampung (Maulidya, 2025).

Sebagai program prioritas nasional, implementasi Program Makan Bergizi Gratis melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dinas pendidikan, dinas kesehatan, satuan pelayanan pemenuhan gizi, sekolah, penyedia makanan, hingga masyarakat (Rahman et al., 2025) (Nasir, Rahmad; Baso, Boli Tonda; Abdullah R.S, Rizki Amrillah, 2026). Kompleksitas aktor yang terlibat menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengoordinasikan seluruh sumber daya yang tersedia agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif (Rosidin et al., 2025).

Dalam perspektif administrasi publik, implementasi merupakan tahapan yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan (Mansur, 2021). Kebijakan yang telah dirancang dengan baik belum tentu menghasilkan dampak yang diharapkan apabila pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala di lapangan. Berbagai penelitian implementasi kebijakan menunjukkan bahwa kegagalan program pemerintah sering kali disebabkan oleh lemahnya komunikasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya, rendahnya komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang belum mampu mendukung koordinasi lintas sektor (Indah et al., 2024) (Amran; Sazali, 2025) (Fahmi, 2025). Kondisi tersebut mengakibatkan tujuan kebijakan tidak tercapai secara optimal meskipun regulasi dan anggaran telah tersedia. Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di tingkat daerah juga menghadapi tantangan implementasi yang beragam. Karakteristik wilayah Indonesia yang luas, kondisi geografis yang berbeda, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang tidak seragam, serta keterbatasan sarana dan prasarana menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Di samping itu, koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sinkronisasi antarlembaga pelaksana, kesiapan sumber daya manusia, serta mekanisme pengawasan menjadi aspek penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III menjadi kerangka analisis yang relevan untuk mengkaji pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di tingkat daerah. Edward III menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan publik. Penelitian mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis masih relatif terbatas karena program ini merupakan kebijakan baru yang sedang diimplementasikan secara bertahap di berbagai daerah. Sebagian besar kajian yang ada lebih menitikberatkan pada aspek gizi, kesehatan, atau dampak sosial ekonomi, sedangkan kajian mengenai implementasi kebijakan dari perspektif administrasi publik, khususnya menggunakan model implementasi George C. Edward III, masih belum banyak dilakukan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi memengaruhi keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Makan Bergizi Gratis melalui pendekatan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan publik serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sehingga tujuan pembangunan sumber daya manusia Indonesia dapat tercapai secara optimal.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap fenomena implementasi kebijakan secara komprehensif melalui penggalian makna, pengalaman, persepsi, serta interaksi para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program di lapangan (Fadli, 2021). Penelitian dilaksanakan pada instansi dan organisasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Program MBG di tingkat daerah, seperti pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional atau satuan pelaksana daerah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, pihak sekolah, penyedia makanan, serta kelompok masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, kewenangan, dan keterlibatan langsung dalam implementasi Program MBG sehingga informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian (Alaslan et al., 2023). Informan penelitian terdiri atas unsur pemerintah, pelaksana teknis, kepala sekolah, guru, tenaga penyedia makanan, orang tua siswa, dan penerima manfaat program. Fokus penelitian diarahkan pada empat dimensi implementasi kebijakan menurut Edward III, yaitu komunikasi yang meliputi proses penyampaian informasi, kejelasan kebijakan, konsistensi komunikasi, dan koordinasi antaraktor; sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, informasi, serta kewenangan; disposisi yang meliputi komitmen, integritas, responsivitas, dan sikap pelaksana terhadap kebijakan; serta struktur birokrasi yang meliputi pembagian tugas, standar operasional prosedur, mekanisme koordinasi, pengawasan, dan fragmentasi organisasi. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif maupun nonpartisipatif terhadap proses implementasi program, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, pedoman teknis Program MBG, laporan pelaksanaan, dokumen anggaran, laporan evaluasi, jurnal ilmiah, buku, serta berbagai dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan sehingga menghasilkan informasi yang lengkap dan saling melengkapi. Untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumen yang diperoleh dari berbagai informan dan waktu pengumpulan data yang berbeda. Selain itu, dilakukan member checking kepada informan untuk memastikan kesesuaian hasil interpretasi peneliti dengan informasi yang diberikan. Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Tahapan penelitian diawali dengan identifikasi permasalahan, penyusunan proposal penelitian, studi pendahuluan, penentuan lokasi dan informan penelitian, penyusunan instrumen wawancara dan observasi, pengumpulan data lapangan, analisis data, pengujian keabsahan data, penyusunan hasil penelitian, pembahasan berdasarkan teori Edward III, hingga penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif tersebut diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai dinamika implementasi Program Makan Bergizi Gratis di tingkat daerah, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas implementasi Program MBG guna mencapai tujuan peningkatan status gizi, kualitas kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.

C. Hasil dan Pembahasan

George C. Edward III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan publik. Dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kualitas kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah pusat, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah daerah mengimplementasikannya melalui koordinasi antarorganisasi, kesiapan sumber daya, komitmen pelaksana, serta mekanisme birokrasi yang mendukung.

Komunikasi

Menurut Edward III (1980), komunikasi merupakan faktor pertama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi berfungsi untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, dan prosedur kebijakan dapat dipahami secara benar oleh seluruh pelaksana maupun kelompok sasaran. Edward III menekankan bahwa komunikasi yang efektif harus memenuhi tiga dimensi utama, yaitu transmisi, kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Pada implementasi Program Makan Bergizi Gratis, komunikasi dilakukan melalui mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui kementerian terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dinas pendidikan, dinas kesehatan, Badan Gizi Nasional (BGN), satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), serta pihak sekolah sebagai pelaksana teknis di lapangan.

a. Transmisi Informasi

Transmisi berkaitan dengan proses penyampaian informasi kebijakan kepada seluruh aktor implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerima pedoman pelaksanaan Program MBG melalui surat edaran, petunjuk teknis, rapat koordinasi, serta sosialisasi yang dilaksanakan secara berjenjang. Pada pelaksanaannya, proses transmisi informasi masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1. perubahan kebijakan yang cukup cepat

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami perkembangan kebijakan yang cukup dinamis sejak mulai diimplementasikan secara nasional pada Januari 2025. Pada tahap awal, kebijakan difokuskan pada pemberian makanan bergizi kepada peserta didik dengan tata kelola yang masih bersifat transisi dan melibatkan berbagai kementerian serta pemerintah daerah. Seiring pelaksanaan, pemerintah membentuk dan memperkuat peran Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai *leading sector* yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan program, disertai penerbitan Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola MBG serta Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG yang mengatur kelembagaan, mekanisme pendanaan, standar operasional, dan pembagian tugas antarinstansi. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan berbagai petunjuk teknis yang lebih spesifik, seperti pengaturan pembentukan dan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mekanisme pemilihan yayasan dan mitra pengelola SPPG, tata cara penggunaan dana, standar penyediaan dan distribusi susu, pedoman distribusi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, pedoman pelaksanaan selama libur sekolah, hingga pedoman sertifikasi keamanan pangan. Pada tahun 2026, kebijakan kembali mengalami penyempurnaan melalui penyesuaian pola distribusi makanan dari enam hari menjadi lima hari mengikuti hari efektif sekolah sebagai bagian dari efisiensi operasional, penerbitan pedoman khusus untuk penyelenggaraan MBG di wilayah terpencil, serta penyempurnaan berbagai mekanisme operasional berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi implementasi. Rangkaian perubahan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan MBG berkembang secara bertahap melalui proses penyempurnaan regulasi, kelembagaan, tata kelola, mekanisme pendanaan, sistem distribusi, dan pengawasan guna meningkatkan efektivitas implementasi serta memastikan program dapat berjalan lebih adaptif terhadap berbagai tantangan di lapangan.

2. belum seluruh sekolah memperoleh informasi secara bersamaan

Belum seluruh sekolah memperoleh informasi mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bersamaan menunjukkan adanya kendala pada aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan. Menurut George C. Edward III, komunikasi merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi karena kebijakan harus ditransmisikan kepada seluruh pelaksana secara tepat waktu, jelas, dan konsisten. Ketidaksamaan waktu penerimaan informasi mengindikasikan bahwa proses transmisi kebijakan belum berlangsung secara merata di seluruh tingkatan birokrasi, sehingga terdapat kesenjangan informasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pelaksana, dan sekolah sebagai implementor di tingkat lapangan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh panjangnya rantai birokrasi, perbedaan kapasitas koordinasi antarwilayah, serta perubahan petunjuk teknis yang relatif cepat sehingga proses sosialisasi tidak dapat menjangkau seluruh sekolah secara serentak. Akibatnya, sebagian sekolah telah melaksanakan kebijakan berdasarkan pedoman terbaru, sementara sekolah lainnya masih menggunakan informasi atau prosedur sebelumnya. Dalam perspektif implementasi kebijakan, ketidaksinkronan penyampaian informasi ini berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi, variasi pelaksanaan program,

keterlambatan implementasi, hingga menurunkan efektivitas pencapaian tujuan kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi MBG memerlukan sistem komunikasi yang terintegrasi, koordinasi lintas level pemerintahan yang lebih efektif, serta mekanisme diseminasi informasi yang mampu menjamin seluruh pelaksana menerima informasi secara cepat, seragam, dan konsisten.

3. keterlambatan penyampaian jadwal distribusi makanan

Keterlambatan penyampaian jadwal distribusi makanan merupakan salah satu indikator belum optimalnya proses komunikasi dalam implementasi kebijakan. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, komunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian substansi kebijakan, tetapi juga mencakup ketepatan waktu penyampaian informasi kepada seluruh pelaksana. Jadwal distribusi makanan merupakan informasi operasional yang menjadi dasar bagi sekolah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penyedia makanan, dan pihak terkait dalam mempersiapkan proses penerimaan, penyimpanan, serta pendistribusian makanan kepada peserta didik. Apabila informasi mengenai jadwal distribusi disampaikan terlambat, maka koordinasi antarpelaksana menjadi kurang efektif, kesiapan sekolah dalam menerima distribusi menjadi terbatas, dan potensi terjadinya keterlambatan pelayanan maupun pemborosan sumber daya semakin meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kelemahan pada mekanisme transmisi informasi dan koordinasi birokrasi, sehingga implementasi kebijakan tidak berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis, ketepatan waktu penyampaian jadwal distribusi merupakan aspek penting untuk menjamin sinkronisasi antaraktor, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan pelayanan kepada penerima manfaat dapat berlangsung secara tepat waktu, konsisten, dan sesuai dengan tujuan kebijakan.

4. koordinasi antarinstansi yang masih bersifat sektoral

Koordinasi antarinstansi yang masih bersifat sektoral menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola yang terintegrasi. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi dan struktur birokrasi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan lintas sektor yang melibatkan Badan Gizi Nasional, kementerian terkait, pemerintah daerah, satuan pendidikan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta penyedia pangan. Apabila setiap instansi masih bekerja berdasarkan kewenangan dan kepentingan sektoral tanpa mekanisme koordinasi yang kuat, maka berpotensi menimbulkan duplikasi tugas, tumpang tindih kewenangan, keterlambatan pengambilan keputusan, serta ketidaksinkronan dalam pelaksanaan program. Kondisi ini juga menghambat kelancaran arus informasi dan mengurangi efektivitas pemecahan masalah yang muncul selama implementasi. Secara akademis, koordinasi yang bersifat sektoral mencerminkan masih kuatnya *bureaucratic fragmentation* (fragmentasi birokrasi), yaitu pembagian kewenangan yang tersebar pada berbagai organisasi tanpa integrasi yang memadai. Edward III menegaskan bahwa fragmentasi birokrasi dapat menjadi penghambat implementasi kebijakan karena mengurangi konsistensi tindakan antarorganisasi dan menyulitkan tercapainya tujuan kebijakan secara efektif. Oleh karena itu, implementasi MBG memerlukan mekanisme koordinasi lintas sektor yang lebih terpadu, pembagian peran yang jelas, serta sistem komunikasi antarlembaga yang mampu mendukung kolaborasi dalam setiap tahapan pelaksanaan program.

b. Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi berkaitan dengan sejauh mana isi kebijakan dipahami oleh pelaksana. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar pelaksana memahami tujuan utama Program MBG yaitu meningkatkan status gizi peserta didik, menurunkan stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia.

Namun demikian, masih ditemukan beberapa perbedaan pemahaman mengenai:

1. Mekanisme pelaporan

Mekanisme pelaporan merupakan salah satu komponen penting dalam implementasi kebijakan karena berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, mekanisme pelaporan berkaitan erat dengan dimensi komunikasi, yaitu bagaimana informasi mengenai pelaksanaan kebijakan disampaikan secara akurat, tepat waktu, dan konsisten dari tingkat pelaksana kepada pengambil

kebijakan. Pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mekanisme pelaporan diperlukan untuk mendokumentasikan berbagai aspek pelaksanaan, seperti jumlah penerima manfaat, realisasi distribusi makanan, penggunaan anggaran, kualitas makanan, kendala operasional, serta capaian program. Apabila mekanisme pelaporan belum berjalan secara optimal, misalnya karena belum adanya format pelaporan yang seragam, keterlambatan penyampaian laporan, atau penggunaan sistem pelaporan yang berbeda antarinstansi, maka proses monitoring dan evaluasi menjadi kurang efektif. Kondisi tersebut dapat menghambat pengambilan keputusan, memperlambat penanganan permasalahan di lapangan, serta mengurangi akuntabilitas pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, mekanisme pelaporan yang terstandarisasi, terintegrasi, dan berbasis data menjadi prasyarat penting untuk mendukung koordinasi antarlembaga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan implementasi Program Makan Bergizi Gratis berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan kebijakan.

2. Standar kualitas makanan

Standar kualitas makanan merupakan instrumen penting dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menjamin bahwa makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi ketentuan gizi, keamanan pangan, kebersihan, dan kelayakan konsumsi. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, standar kualitas makanan berkaitan erat dengan dimensi komunikasi, karena keberhasilan implementasi bergantung pada sejauh mana standar tersebut dikomunikasikan secara jelas, konsisten, dan dipahami oleh seluruh pelaksana kebijakan, mulai dari Badan Gizi Nasional, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penyedia makanan, hingga pihak sekolah. Standar yang tidak disosialisasikan secara memadai atau mengalami perubahan tanpa disertai komunikasi yang efektif dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dalam penyusunan menu, pengolahan, penyimpanan, maupun distribusi makanan, sehingga kualitas layanan menjadi tidak seragam antarwilayah. Akibatnya, tujuan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik berpotensi tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, implementasi MBG memerlukan standar kualitas makanan yang jelas, terukur, dan disertai mekanisme sosialisasi, pengawasan, serta evaluasi yang berkelanjutan agar seluruh pelaksana memiliki pemahaman yang sama dan mampu menerapkan standar tersebut secara konsisten di setiap tahapan penyelenggaraan program.

3. Prosedur penanganan makanan yang tidak layak konsumsi

Prosedur penanganan makanan yang tidak layak konsumsi merupakan bagian penting dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menjamin keamanan pangan, melindungi kesehatan penerima manfaat, serta menjaga kualitas pelayanan publik. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, prosedur ini berkaitan erat dengan dimensi komunikasi, karena keberhasilannya ditentukan oleh kejelasan, konsistensi, dan ketepatan penyampaian informasi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ditemukan makanan yang rusak, terkontaminasi, kedaluwarsa, atau tidak memenuhi standar keamanan pangan. Seluruh pelaksana kebijakan, mulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penyedia makanan, pihak sekolah, hingga instansi pengawas, harus memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme identifikasi, penghentian distribusi, penarikan produk, pelaporan kejadian, penggantian makanan, serta tindak lanjut evaluasi. Apabila prosedur tersebut tidak dikomunikasikan secara jelas atau dipahami secara berbeda oleh para pelaksana, maka dapat terjadi keterlambatan penanganan, perbedaan tindakan di lapangan, meningkatnya risiko gangguan kesehatan pada penerima manfaat, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap program. Oleh karena itu, prosedur penanganan makanan yang tidak layak konsumsi harus dituangkan dalam standar operasional yang jelas, disosialisasikan secara menyeluruh, dan didukung oleh mekanisme koordinasi serta pelaporan yang efektif agar implementasi kebijakan berlangsung secara aman, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan Program Makan Bergizi Gratis.

Sumber Daya

Edward III menjelaskan bahwa kebijakan tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, informasi, kewenangan, dan sarana-prasarana.

1. Sumber Daya Manusia

Program MBG melibatkan banyak aktor, antara lain: Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, kepala sekolah, guru, tenaga kesehatan, penyedia makanan, petugas dapur, tenaga distribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah personel secara umum cukup tersedia, tetapi kompetensi masih belum merata, terutama terkait pengelolaan keamanan pangan, pencatatan administrasi, dan penggunaan aplikasi pelaporan. Pelatihan yang dilakukan pemerintah telah membantu meningkatkan kapasitas pelaksana, namun masih diperlukan pelatihan secara berkala.

Dalam perspektif implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III, sumber daya manusia merupakan salah satu determinan utama keberhasilan implementasi kebijakan. Edward III menegaskan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik tidak akan menghasilkan output yang optimal apabila tidak didukung oleh aparatur pelaksana yang memiliki jumlah memadai, kompetensi yang sesuai, komitmen tinggi, serta kemampuan teknis dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, sumber daya manusia tidak hanya dipahami sebagai jumlah personel yang tersedia (*quantity of personnel*), tetapi juga meliputi kualitas, kapasitas, profesionalisme, keterampilan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebijakan. Dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sumber daya manusia merupakan komponen strategis karena program ini bersifat multisektoral dan melibatkan banyak pemangku kepentingan mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Aktor yang terlibat meliputi Badan Gizi Nasional sebagai koordinator nasional, pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan di wilayah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, kepala sekolah, guru, tenaga kesehatan, penyedia bahan pangan, petugas dapur, tenaga distribusi, hingga petugas administrasi dan pelaporan. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa implementasi MBG tidak hanya membutuhkan koordinasi kelembagaan, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia yang mampu menjalankan fungsi masing-masing secara profesional dan terintegrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek kuantitas, jumlah personel yang terlibat dalam implementasi Program MBG secara umum telah mencukupi kebutuhan operasional. Setiap sekolah telah memiliki penanggung jawab program, sementara proses produksi dan distribusi makanan juga didukung oleh petugas dapur dan tenaga distribusi yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya memenuhi kebutuhan tenaga pelaksana sehingga tidak ditemukan hambatan yang signifikan terkait kekurangan jumlah personel. Namun, jika ditinjau dari aspek kualitas, masih terdapat variasi kompetensi antar pelaksana. Perbedaan kapasitas tersebut terutama terlihat pada kemampuan dalam menerapkan standar keamanan pangan (*food safety*), pengelolaan administrasi program, pencatatan data penerima manfaat, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta penggunaan aplikasi digital yang digunakan sebagai sistem pelaporan nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sumber daya manusia, tetapi juga oleh tingkat kompetensi yang dimiliki dalam menjalankan tugas sesuai standar operasional.

Dari perspektif capacity building, temuan tersebut mengindikasikan bahwa sebagian pelaksana masih berada pada tahap penyesuaian terhadap sistem kerja baru yang diperkenalkan dalam Program MBG. Program ini membawa perubahan dalam tata kelola pelayanan publik, terutama melalui penggunaan teknologi informasi sebagai instrumen monitoring dan evaluasi. Tidak semua pelaksana memiliki tingkat literasi digital yang sama sehingga muncul variasi dalam kemampuan mengoperasikan aplikasi pelaporan, melakukan input data secara tepat waktu, maupun menyusun dokumentasi administrasi sesuai ketentuan. Perbedaan kapasitas tersebut berpotensi memengaruhi kualitas data implementasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Selain kompetensi administrasi, aspek keamanan pangan menjadi perhatian yang sangat penting. Program MBG berkaitan langsung dengan konsumsi makanan oleh peserta didik sehingga seluruh petugas yang terlibat harus memahami prinsip higiene dan sanitasi pangan, prosedur penyimpanan bahan makanan, teknik pengolahan yang memenuhi standar kesehatan, pengendalian mutu, serta mekanisme penanganan apabila ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi. Ketidaktahuan atau rendahnya kompetensi pada aspek tersebut dapat meningkatkan risiko kontaminasi makanan, menurunkan kualitas gizi, bahkan berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa berupa keracunan pangan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) sebagai upaya meningkatkan kapasitas pelaksana. Materi pelatihan meliputi prosedur operasional Program MBG, standar

penyediaan makanan bergizi, keamanan pangan, tata kelola administrasi, penggunaan aplikasi pelaporan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Pelatihan tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman pelaksana, terutama dalam menyamakan persepsi mengenai tujuan program dan standar pelaksanaan yang harus dipenuhi. Meskipun pelatihan yang bersifat insidental belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan. Dalam implementasi kebijakan publik, peningkatan kompetensi seharusnya dilakukan melalui mekanisme *continuous capacity development*, yaitu proses pembelajaran yang berlangsung secara terus-menerus seiring dengan dinamika kebijakan dan perkembangan kebutuhan di lapangan. Perubahan regulasi, pembaruan sistem pelaporan digital, maupun munculnya permasalahan baru dalam pelaksanaan program menuntut adanya pelatihan berkala, pendampingan teknis, supervisi lapangan, serta evaluasi kompetensi secara periodik.

Pengembangan sumber daya manusia juga perlu diarahkan pada pembentukan kompetensi kolaboratif (*collaborative competence*). Mengingat Program MBG merupakan kebijakan lintas sektor, setiap aktor tidak hanya dituntut memahami tugas institusinya masing-masing, tetapi juga memiliki kemampuan berkomunikasi, berkoordinasi, menyelesaikan konflik, dan berbagi informasi dengan instansi lain. Kompetensi kolaboratif menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa proses perencanaan, penyediaan bahan makanan, distribusi, pengawasan kualitas, hingga pelaporan berjalan secara terpadu tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun keterlambatan pelaksanaan.

2. Sumber Daya Anggaran

Dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III, sumber daya tidak hanya mencakup sumber daya manusia, tetapi juga meliputi sumber daya finansial (anggaran), fasilitas, informasi, dan kewenangan. Anggaran merupakan instrumen penting yang menentukan sejauh mana suatu kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, implementasi kebijakan akan mengalami berbagai hambatan meskipun komunikasi, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi telah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, anggaran dipandang sebagai *enabling resource* yang memungkinkan seluruh aktivitas implementasi kebijakan dapat terlaksana sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel. 1 Alokasi Anggaran MBG

Tahun	Alokasi Anggaran (APBN)	Keterangan
2025	Rp71 triliun	Alokasi awal APBN 2025 untuk pelaksanaan Program MBG secara nasional melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Target awal sekitar 17,9 juta penerima manfaat dan berkembang hingga 82,9 juta penerima secara bertahap. (Kemenkeu Media)
2025 (Tambahan Cadangan)	Rp100 triliun	Pemerintah menyiapkan tambahan anggaran apabila cakupan penerima manfaat diperluas sesuai percepatan implementasi Program MBG. Tambahan ini merupakan cadangan anggaran, bukan bagian dari pagu awal APBN. (Kemenkeu Media)
2026	Rp335 triliun	Anggaran Program MBG dalam APBN 2026 yang telah disahkan DPR untuk memperluas cakupan pelayanan hingga sekitar 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. (E-Media DPR RI)

Berdasarkan tabel alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terlihat bahwa pemerintah menunjukkan komitmen fiskal yang semakin besar dalam mendukung implementasi kebijakan pemenuhan gizi nasional. Peningkatan alokasi anggaran dari tahun ke tahun mencerminkan bahwa Program MBG ditempatkan sebagai salah satu program prioritas nasional yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui intervensi pemenuhan gizi bagi peserta didik.

Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Alokasi tersebut merupakan pendanaan awal untuk mendukung pelaksanaan Program MBG secara nasional, meliputi pembiayaan pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi, operasional dapur, monitoring dan evaluasi, serta penguatan kelembagaan

pelaksana. Pada tahap awal implementasi, anggaran tersebut ditujukan untuk melayani sekitar 17,9 juta penerima manfaat, yang terdiri atas peserta didik dan kelompok sasaran lainnya. Besaran anggaran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan sumber daya finansial yang cukup besar sebagai fondasi awal implementasi kebijakan. Seiring dengan meningkatnya cakupan pelayanan, pemerintah juga menyiapkan tambahan cadangan anggaran sebesar Rp100 triliun pada tahun 2025. Tambahan dana ini bukan merupakan bagian dari pagu APBN awal, melainkan sebagai bentuk fiskal buffer atau cadangan fiskal yang dapat digunakan apabila percepatan implementasi memerlukan perluasan jumlah penerima manfaat. Penyediaan anggaran cadangan tersebut mencerminkan adanya fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah telah mengantisipasi kemungkinan peningkatan kebutuhan pendanaan selama proses implementasi berlangsung. Memasuki tahun anggaran 2026, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran Program MBG menjadi Rp335 triliun. Dibandingkan dengan pagu awal tahun 2025 sebesar Rp71 triliun, terjadi peningkatan sebesar Rp264 triliun atau sekitar 372%. Peningkatan yang sangat signifikan ini menunjukkan adanya perubahan skala implementasi kebijakan dari tahap awal (*pilot expansion*) menuju implementasi nasional secara penuh (*full-scale implementation*). Anggaran tersebut diarahkan untuk memperluas cakupan pelayanan hingga sekitar 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, sekaligus memperkuat infrastruktur pendukung seperti pembangunan dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem distribusi pangan, serta pengembangan sistem monitoring dan pelaporan berbasis digital.

Apabila dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa dimensi sumber daya (*resources*), khususnya sumber daya anggaran, telah memperoleh perhatian yang sangat besar dari pemerintah. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kecukupan sumber daya yang tersedia. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, pelaksana kebijakan akan mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas, merekrut tenaga pelaksana, melakukan distribusi layanan, maupun melaksanakan pengawasan terhadap program. Namun, teori Edward III juga menegaskan bahwa ketersediaan anggaran yang besar bukan merupakan satu-satunya faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Anggaran yang besar harus diikuti dengan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan kata lain, peningkatan alokasi anggaran harus diimbangi dengan kemampuan birokrasi dalam merencanakan penggunaan anggaran, mempercepat proses pencairan dana, mengendalikan kualitas belanja, serta memastikan bahwa seluruh dana digunakan secara tepat sasaran sesuai tujuan Program MBG.

Tabel 2. Realisasi anggaran tahun 2025

Indikator	Nilai
Pagu APBN 2025	Rp71 triliun
Realisasi sampai 31 Desember 2025	Rp51,5 triliun
Persentase Penyerapan	72,5%
Nilai manfaat yang langsung diterima masyarakat	Rp43,3 triliun
Jumlah penerima manfaat (awal Januari 2026)	±56,13 juta orang
Jumlah SPPG (Dapur MBG)	19.343 unit

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun pagu anggaran sebesar Rp71 triliun, realisasi belanja hingga akhir tahun 2025 mencapai Rp51,5 triliun atau sekitar 72,5% dari pagu APBN. Dari perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, data tersebut menunjukkan bahwa dimensi sumber daya anggaran mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Alokasi anggaran meningkat dari Rp71 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp335 triliun pada tahun 2026, atau meningkat sekitar 372% (bertambah Rp264 triliun). Peningkatan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas cakupan Program MBG sebagai salah satu program prioritas nasional.

Namun Efektivitas implementasi tetap ditentukan oleh kemampuan birokrasi dalam mengelola anggaran secara tepat sasaran, efisien, transparan, dan akuntabel. Fakta bahwa realisasi anggaran tahun 2025 baru mencapai 72,5% mengindikasikan bahwa tantangan implementasi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dana, tetapi juga menyangkut kesiapan organisasi, kapasitas pelaksana, percepatan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mekanisme distribusi, serta koordinasi antarinstansi. Dengan

demikian, dalam perspektif implementasi kebijakan, kualitas tata kelola anggaran menjadi faktor yang sama pentingnya dengan besaran alokasi anggaran itu sendiri.

Disposisi

Dalam perspektif George C. Edward III (1980), disposisi merupakan sikap, komitmen, kejujuran, kemauan, dan tingkat penerimaan para pelaksana terhadap suatu kebijakan. Disposisi menunjukkan sejauh mana implementor memiliki kesediaan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Edward III menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, dan struktur birokrasi yang jelas, tetapi juga oleh sikap positif para pelaksana terhadap kebijakan tersebut. Apabila implementor tidak memiliki komitmen, motivasi, atau pemahaman yang baik terhadap substansi kebijakan, maka implementasi cenderung mengalami penyimpangan atau bahkan kegagalan.

Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis (MBG), disposisi tercermin pada komitmen seluruh aktor pelaksana, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), kepala sekolah, guru, penyedia makanan, hingga tenaga pengelola dapur dalam menjalankan program sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kepatuhan terhadap standar mutu makanan, ketepatan waktu distribusi, pemenuhan prinsip keamanan pangan, serta orientasi pada peningkatan status gizi peserta didik sebagai tujuan utama program.

Disposisi yang baik juga ditunjukkan melalui integritas pelaksana dalam mengelola anggaran dan sumber daya secara transparan serta akuntabel. Mengingat Program MBG melibatkan anggaran negara yang besar dan cakupan sasaran yang luas, pelaksana dituntut untuk memiliki komitmen tinggi dalam mencegah praktik penyimpangan, seperti pengurangan kualitas bahan makanan, manipulasi jumlah penerima manfaat, maupun penyalahgunaan anggaran. Integritas menjadi faktor penting agar manfaat program benar-benar diterima oleh kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan. Selain itu, disposisi implementor tercermin dalam motivasi untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pelaksana tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kondisi gizi peserta didik. Sikap responsif terhadap keluhan, kemampuan menyelesaikan permasalahan distribusi makanan, serta kesediaan melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan merupakan indikator bahwa implementor memiliki orientasi pelayanan publik yang kuat.

Dalam implementasi MBG, disposisi juga berkaitan dengan kesediaan pelaksana menerima perubahan kebijakan. Program MBG merupakan kebijakan nasional yang membutuhkan penyesuaian sistem kerja di tingkat daerah, termasuk perubahan pola koordinasi antarinstansi, mekanisme pengadaan makanan, serta sistem pelaporan. Pelaksana yang memiliki disposisi positif akan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan tersebut, bersedia mengikuti pelatihan, serta mendukung inovasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Sebaliknya, disposisi yang rendah dapat menimbulkan berbagai hambatan implementasi, seperti rendahnya kepatuhan terhadap prosedur operasional, kurangnya tanggung jawab dalam menjaga kualitas makanan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya inisiatif dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas Program MBG, menurunkan kualitas pelayanan kepada peserta didik, bahkan menghambat pencapaian tujuan kebijakan dalam meningkatkan status gizi dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Oleh karena itu, dalam perspektif Edward III, keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis sangat bergantung pada disposisi para implementor. Komitmen, integritas, tanggung jawab, profesionalisme, dan orientasi pelayanan publik merupakan faktor-faktor yang menentukan apakah kebijakan dapat dilaksanakan secara konsisten dan efektif. Dengan disposisi yang positif, pelaksana tidak hanya menjalankan prosedur administratif, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang memastikan tujuan Program MBG, yaitu peningkatan gizi, kesehatan, dan kualitas pendidikan peserta didik, dapat tercapai secara optimal.

Struktur Birokrasi

Dalam perspektif implementasi kebijakan George C. Edward III, struktur birokrasi merupakan salah satu variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Struktur birokrasi mengacu pada sistem organisasi yang mengatur pembagian tugas, kewenangan, tanggung jawab, mekanisme koordinasi, serta prosedur kerja antarunit organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang efektif akan menciptakan

koordinasi yang baik, memperjelas alur pengambilan keputusan, serta meminimalkan terjadinya tumpang tindih kewenangan. Sebaliknya, struktur birokrasi yang kompleks dan tidak terkoordinasi berpotensi menghambat pencapaian tujuan kebijakan meskipun aspek komunikasi, sumber daya, dan disposisi pelaksana telah memadai.

Dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), struktur birokrasi memiliki peran yang sangat strategis karena program ini melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, satuan pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga penyedia pangan lokal. Kompleksitas aktor tersebut menuntut adanya struktur organisasi yang jelas agar setiap pihak memahami fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya masing-masing. Menurut Edward III, struktur birokrasi dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi organisasi.

1. *Standard Operating Procedure (SOP)*

Standard Operating Procedure (SOP) merupakan pedoman operasional yang menjadi acuan bagi setiap pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas secara konsisten, efektif, dan akuntabel. SOP bertujuan menciptakan keseragaman tindakan, mengurangi kesalahan administratif, serta memastikan bahwa pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan. Dalam implementasi Program MBG, SOP menjadi instrumen penting untuk menjamin bahwa seluruh tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai standar nasional. SOP mencakup mekanisme perencanaan kebutuhan makanan, proses pengadaan bahan pangan, penyusunan menu bergizi sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG), pengolahan makanan yang memenuhi standar keamanan pangan, distribusi makanan ke sekolah atau kelompok sasaran, pengawasan kualitas makanan, hingga mekanisme evaluasi dan pelaporan. Selain itu, SOP juga mengatur prosedur penanganan makanan yang tidak layak konsumsi, pengaduan masyarakat, serta mitigasi apabila terjadi keterlambatan distribusi atau kejadian luar biasa seperti keracunan makanan. Keberadaan SOP dalam Program MBG bertujuan untuk menjaga kualitas layanan secara merata di seluruh daerah, meskipun terdapat perbedaan kondisi geografis dan kapasitas sumber daya. Dengan adanya SOP yang jelas, pelaksana di tingkat pusat maupun daerah memiliki pedoman yang sama sehingga dapat mengurangi variasi pelaksanaan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan pelayanan. Namun demikian, efektivitas SOP sangat bergantung pada kemampuan pelaksana dalam memahami, melaksanakan, serta melakukan pengawasan terhadap kepatuhan prosedur yang telah ditetapkan.

2. *Fragmentasi Organisasi*

Fragmentasi organisasi merupakan kondisi ketika implementasi kebijakan melibatkan banyak organisasi atau instansi dengan kewenangan yang berbeda-beda. Menurut Edward III, semakin banyak organisasi yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan, semakin besar pula potensi munculnya masalah koordinasi, perbedaan kepentingan, tumpang tindih kewenangan, serta lambatnya proses pengambilan keputusan. Program MBG merupakan salah satu kebijakan nasional yang memiliki tingkat fragmentasi organisasi yang tinggi. Pelaksanaannya melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator utama, kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, sekolah, puskesmas, penyedia jasa boga, pelaku UMKM pangan, serta kelompok masyarakat. Masing-masing institusi memiliki fungsi yang berbeda, seperti penyusunan kebijakan, penyediaan anggaran, pengawasan mutu gizi, pengadaan bahan pangan, distribusi makanan, hingga monitoring dan evaluasi. Tingginya fragmentasi organisasi dalam Program MBG dapat menjadi kekuatan apabila didukung oleh koordinasi lintas sektor yang efektif. Sebaliknya, apabila koordinasi tidak berjalan dengan baik, fragmentasi berpotensi menyebabkan keterlambatan distribusi makanan, perbedaan standar pelayanan antarwilayah, ketidaksesuaian data penerima manfaat, serta lemahnya pengawasan terhadap kualitas makanan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang terintegrasi melalui pembagian tugas yang jelas, sistem informasi bersama, forum koordinasi rutin, serta mekanisme monitoring dan evaluasi lintas instansi.

Berdasarkan teori Edward III, keberhasilan implementasi Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh kecukupan sumber daya atau komitmen pelaksana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang efektif. Struktur birokrasi yang didukung oleh SOP yang jelas dan fragmentasi organisasi yang terkoordinasi akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, memperkuat akuntabilitas antarinstansi, menjamin kualitas pelayanan, serta memastikan bahwa tujuan Program MBG dalam meningkatkan status gizi peserta didik dan kelompok sasaran lainnya dapat tercapai secara optimal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III, implementasi Program Makan Bergizi Gratis di tingkat daerah menunjukkan bahwa keempat variabel saling memengaruhi. Komunikasi yang cukup baik memungkinkan informasi kebijakan tersampaikan kepada pelaksana, meskipun masih terdapat kendala pada konsistensi dan keseragaman interpretasi. Dari sisi sumber daya, dukungan personel, anggaran, serta sarana-prasarana telah tersedia, tetapi belum merata sehingga memengaruhi kualitas pelaksanaan di berbagai wilayah. Disposisi pelaksana menjadi faktor yang relatif paling kuat karena sebagian besar aparat dan pihak sekolah menunjukkan komitmen tinggi terhadap tujuan program meskipun menghadapi beban kerja tambahan. Sementara itu, struktur birokrasi telah didukung oleh SOP dan pembagian tugas antarlembaga, namun koordinasi lintas sektor dan integrasi sistem administrasi masih perlu diperkuat untuk mengurangi dampak fragmentasi organisasi.

Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan nasional, tetapi juga oleh kapasitas pemerintah daerah dalam membangun komunikasi yang efektif, memastikan kecukupan sumber daya, menumbuhkan komitmen pelaksana, serta menciptakan tata kelola birokrasi yang terkoordinasi. Dengan demikian, penguatan sinergi antarpemangku kepentingan dan penyempurnaan mekanisme implementasi menjadi prasyarat penting agar tujuan program, yaitu peningkatan status gizi peserta didik dan kualitas sumber daya manusia Indonesia, dapat tercapai secara optimal.

E. Referensi

- Ahsan; Ahmad Nur, M. A. (2025). PROGRAM PEMERINTAH PEMBERIAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) UNTUK MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL MENUJU INDONESIA EMAS 2045 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN NASIONAL 1 Teknik Elektronika Pertahanan , Akademi Militer A. *JURNAL ELEKTROSISTA*, 13(1), 28–39.
- Alaslan, A., Laxmi, A. P. O. A. B. S., Rustandi, N. R. E. S., & Richway, S. R. D. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.
- Amran; Sazali, H. (2025). *Formulasi Regulasi dan Kebijakan Komunikasi dalam Pelaksanaan Program Pembangunan : Studi pada Program Makan Bergizi Gratis Abstrak*. 6(3), 1670–1679.
- Ayuni, D. T. (2025). DILEMA PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PADA SISWA. *Triwikrama: Jurnal Multi Disiplin Ilmu Sosial*, 8(8).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fahmi, M. (2025). *Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan dalam Implementasi Kebijakan Publik*. 1(1), 1–8.
- Febrian, J. L.; N. I. S. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan (Studi Tentang Pusat Pelayanan Dan Pemberdayaan Perempuan Di. *Journal of Governance Innovation*, 5(2), 345–369.
- Indah, V. F., Zubaidah, S., Lestari, D. P., Uswatun, A., Sari, F. H., & Fatiha, Emilda Sinar, B. (2024). *TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN TIM RENSTRA DI KESBANGPOL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR*. 7(September).
- Lendra, I. W. D. Y. F. (2025). Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Kebijakan Makan Bergizi Gratis dan Relevansinya terhadap Nilai-nilai. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5(1).
- Mansur, J. (2021). IMPLEMENTASI KONSEP PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PUBLIK. *AT-TAWASSUTH:Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324–334.
- Maulidya, A. Y. F. (2025). Analisis Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Strategi Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar di Lampung. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5(3).
- Nasir, Rahmad; Baso, Boli Tonda; Abdullah R.S, Rizki Amrillah, R. P. P. (2026). *Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah : Analisis Tata Kelola .* 9(September 2025), 2548–2553.
- Qomarrullah, R. S. L. W. M. S. (2025). *DAMPAK JANGKA PANJANG PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS TERHADAP KESEHATAN DAN KEBERLANJUTAN PENDIDIKAN*. 5(2), 130–137.
- Rahman, A., Fikri, M., Maysha, H. M., Hukum, F., Hukum, F., & Hukum, F. (2025). *REFORMASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS UNTUK PEMENUHAN HAK SOSIAL*. 9(1), 82–104.
- Rambe, M. T., Ritonga, R. A., Harahap, T., & Sitio, R. (2025). *Pemetaan Awal Implementasi*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Labuhanbatu : Perspektif Manajemen SDM. 4(4), 5177–5184.

Rosidin, A., Maulana, J., & Dharmawan, A. (2025). *Tantangan dan Strategi Implementasi Program Makan Bergizi Gratis : Studi Kasus Pemerintah Daerah Provinsi Banten. 3(2), 131–143.*